

DISKURSUS POLITIK ETIS DALAM FILM GURU BESAR TJOKROAMINOTO

Adelia Risnaning Tyas
Universitas Gadjah Mada
E-mail: artadelyas@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK. wacana politik etis pada film Guru Besar Tjokroaminoto mengisahkan sebuah perlawanan Tjokroaminoto dan para intelektual terhadap wacana politik etis tentang sebuah hadiah pendidikan, perairan serta ancaman penangkapan bagi mereka yang melanggar norma-norma politik etis. Metode analisis wacana digunakan untuk mengamati relasi kekuasaan yang terbentuk dari episteme atau pengetahuan di zaman politik etis. Kekuasaan didisiplinkan, dinormalisasi dari pengetahuan, terbentuk karena adanya relasi antar masyarakat, penjajah, dan organisasi hingga tercipta kebenaran pada masanya. Penelitian menemukan adanya wacana pendidikan, pembangunan moral pada janji-janji politik etis, pendisiplinan, normalisasi subjek dengan episteme membentuk dan dididik atas larangan, penolakan, oposisi benar dan salah. Penolakan organisasi yang tidak benar atau tidak sejalan dengan politik etis. Kedisiplinan dan hukuman tidak sesuai dengan aturan. Hukuman guru kepada murid jika berkomentar atau menjawab soal, hingga adanya episteme pendisiplinan yang dinormalisasikan oleh pekerja, penjara, perceraian dan pernikahan oleh perempuan dengan alasan untuk patuh kepada orangtua.

Kata Kunci: diskursus; politik etis; Tjokroaminoto

ABSTRACT. This research discusses on ethical politics in the film “Guru Besar Tjokroaminoto”. narrates a resistance led by Tjokroaminoto and intellectuals against the discourses of ethical political concerning education, along with the threat of arrest for those who violate ethical political norms. Discourse analysis methods are employed to observe power relations formed by episteme or knowledge during the era of ethical politics. Power is established, normalized through knowledge, and established due to relations among society, colonialist and organizations ultimately creating the truths of its time. The research reveals the discourse on education, moral development in the promises of ethical political discourse, subject discipline, normalization through episteme, shaping and educating under prohibitions, rejections, oppositions of right and wrong. Rejection of organizations differing from ethical politics, perspective on progress, and power eliminations. Discipline and punishment do not conform to the rules, including teachers’ punishment of students for commenting or answering questions to body discipline normalized by women as a pretext for obedience to parents.

Keywords: discourses; ethical politics; Tjokroaminoto

PENDAHULUAN

Kemajuan sistem tanam paksa yang dijalankan oleh Belanda dalam perlawanan menimbulkan penderitaan bagi Indonesia, dengan segala bentuk kebijakan yang selalu menguntungkan Belanda secara sepihak. Sistem tanam paksa cenderung merugikan penduduk setempat karena penduduk tidak menerima hasil bumi dengan layak, sehingga pemerintah mendapat kritikan, karena menyebabkan kemelaratan bagi penduduk setempat (van Niel, 2009: 19).

Eksploitasi kolonialisme Belanda memperburuk tingkat kemiskinan di Indonesia. Meskipun Pemerintahan kolonial berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama yang tertinggal dari Negara-negara lainnya. Para pengusaha swasta menyadari bahwa peningkatan kesejahteraan penduduk akan menguntungkan koloni tersebut. Masyarakat Eropa yang berpikiran modern mulai merasa terganggu dengan penurunan kondisi penduduk Indonesia. Ketidakpuasan ini mendorong munculnya suatu orientasi baru yaitu politik etis, pada awalnya hanya memberikan perhatian pada suatu golongan, namun kemudian ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Politik etis atau disebut dengan *ethische politic* yang artinya politik

haluan utama berkembang di Indonesia pada awal abad ke-20.

Dalam era politik etis atau politik balas budi fokus utama adalah membentuk imigrasi, menciptakan perairan dan menyediakan pendidikan bagi Hindia Belanda atau Indonesia menuju kemajuan walaupun tetap dibawah penguasaan Belanda. Pendidikan yang diberikan memiliki tujuan untuk mengubah pandangan serta asumsi masyarakat Indonesia dan mengupayakan kebebasan bangsa Indonesia (Susilo & Isbandiyah, 2018:1). Saat itu, seluruh kebijakan di Indonesia berada di bawah kendali Belanda dan politik etis diciptakan dengan tujuan menguntungkan koloni. Pemusatan pada imigrasi, perairan, dan pendidikan merupakan amanat yang disampaikan ratu untuk membentuk mental kesejahteraan Bumiputera.

Sistem Pendidikan yang dibentuk pada masa tersebut dibagi berdasarkan golongan, melibatkan status dan keturunan seseorang. Golongan tersebut terdiri dari Eropa, Bumiputera dengan status bangsawan, ulama, pemimpin adat, hingga biasa, dan golongan Timur Asing (Makmur, 1993: 65). Tempat sekolah dan kurikulum yang diajarkan tidak merata di antara masyarakat biasa; kurikulum mereka hanya mencakup ketrampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung sederhana.

Wacana, dalam konteks ini, memiliki sejumlah kegunaan yang kompleks, yaitu interaksi simbolis manusia melalui bahasa lisan atau tulisan, gerak tubuh, gambar, diagram film bahkan musik (Meriel & Thomas, 2007:2). Wacana juga diartikan sebagai komunikasi baik lisan maupun tulisan tentang cara pandang terhadap nilai atau pengalaman (Fowler, 1979). Analisis wacana oleh Van Dijk pada (Halwati, 2013:71) menyoroti perannya sebagai pernyataan, kritik, gugatan, atau gertakan. Foucault (Wiradnyana, 2018:12) menggambarkan wacana sebagai diskursus atau sistem kemungkinan dari pengetahuan yang memiliki peran mengontrol, menormalkan, dan mendisiplinikan individu serta membatasi pandangan.

Perhatian Foucault terfokus pada episteme, bukan sekedar pengetahuan spesifik dalam suatu ilmu yang ada dari generasi ke generasi. Episteme mencakup otoritas rezim pengetahuan pada suatu masa. Pemeriksaan sejarah tidak hanya terfokus pada bentuk pengetahuan, tetapi pada definisi atau rancangan yang terstruktur dengan spesifik, lalu membentuk otoritas dan legitimasi serta menjelaskan semua hal. *legitimite* yang terstruktur ini dapat mempengaruhi praktik-praktik individu, seperti pandangan, tindakan, dan ungkapan sebagai bentuk normalisasi atau pengetahuan dominan dalam suatu episteme atau wacana (Foucault, 2017:312-313).

Pola pengetahuan yang diusung oleh Foucault bukanlah ukuran pertumbuhan, melainkan pergeseran pola pengetahuan lalu ke pola pengetahuan yang berbeda bersifat dogmatif sebagai rezim wacana dalam suatu zaman yang spesifik. Penggunaan Arkeologi untuk menjelajahi histori yang berurutan dengan mengambil pemaknaan episteme. Pola pengetahuan yang sudah ditegaskan pada suatu keadaan sebagai pemaknaan zaman tertentu adalah Episteme.

Dalam diskursus tentang kegilaan, Foucault berusaha menerangkan tentang konsep yang bertentangan dengan kegilaan atau sebuah pandangan yang sering diabaikan dari suatu zaman, yaitu menerangkan tentang “yang lain” dari kegilaan (Bevir, 1999: 347). “kegilaan” sering kali merupakan cerminan dari norma-norma sosial dan kekuasaan yang berlaku, serta bagaimana masyarakat memilih untuk mengelompokkan dan mengasingkan mereka yang dianggap berbeda atau tidak normal. Dalam konteks ini “yang lain” dari kegilaan merujuk pada pandangan yang tidak sesuai dengan norma-norma tersebut, menyoroti bagaimana kegilaan dan rasionalitas tidak selalu merupakan kategori yang tetap atau objektif, melainkan dapat berubah-ubah tergantung pada konteks sejarah.

Penegasan pengetahuan hingga menjadi istimewa melibatkan proses otoriter yang menetap,

melibatkan gabungan pengetahuan ilmiah dan kekuasaan. Penegasan ini terjadi dalam ruang lingkup diskursus atau wacana. Pengetahuan ilmiah bukan hanya mencari kebenaran atau kesalahan, tetapi juga melibatkan pemisahan yang mungkin tidak dilakukan atau dipertimbangkan oleh pengetahuan dari suatu episteme. Melalui episteme, kekuasaan dapat beroperasi dan menjelaskan transformasi rezim pengetahuan dari era tertentu, melibatkan kekuasaan (Foucault, 2002:216). Contohnya, kekuasaan tidak hanya dimiliki pemerintah yang memiliki kontrol atas rakyatnya, tetapi juga dapat berkaitan dengan hubungan antara individu, seperti hubungan suami istri. Foucault menyajikan hipotesisnya tentang kekuasaan yang terdiri dari lima poin (Foucault, 1978: 94-95).

- a. Pencapaian, perolehan, dan penggunaan kekuasaan tidak dianggap sebagai suatu hal yang dapat diikat atau dimiliki, tetapi kekuasaan dijalankan melalui hubungan yang berjalan terus-menerus dari berbagai arah.
- b. Hubungan kekuasaan tidak terstruktur dalam suatu bagan atau struktur yang dapat mendominasi dan didominasi.
- c. Kekuasaan dimulai dari akar dan menginginkan musnahnya oposisi biner atau kelainan karena kekuasaan mencakup keseluruhan atau keduanya.
- d. Relasi kekuasaan tidak bersifat kekhususan.
- e. Setiap ada kekuasaan akan selalu ada resistensi, resistensi muncul ketika individu tidak sejalan dengan kekuasaan yang ada atau tidak memiliki jalan keluar dari kekuasaan.

Salah satu film yang menceritakan wacana pengetahuan pada masa politik etis adalah “Guru Bangsa: Tjokroaminoto”. Film ini mengisahkan seorang intelektual yang membela masyarakat Indonesia dan memberontak koloni-koloni Belanda pada zaman kolonial. Dalam film ini tergambar keadaan Indonesia yang kacau karena politik, agama, perbedaan yang masih sering terjadi pada setiap masa. Tjokroaminoto, seorang bangsawan yang bersekolah pada masa politik etis melihat kondisi Indonesia. Film ini mencerminkan kehidupan seorang Oemar Siad Tjokroaminoto dari kelahirannya hingga usia tuanya, bagaimana ia melawan Belanda dan saat dewasa menikah dengan puteri bupati Ponorogo, Soeharsikin (Toni, 2018:4).

Film ini juga mengisahkan bagaimana sistem pengetahuan menjadi penghubung penguasa, Tjokro yang mulai terlibat dalam pergerakan politik untuk memperjuangkan masyarakat Indonesia dengan bergabung dalam organisasi Sarekat Islam.

Film menggambarkan tentang larangan-larangan terhadap sistem yang ada, pandangan-pandangan

yang dianggap salah, kerusakan, dan orang yang dianggap berbahaya. Film ini memberikan gambaran pengetahuan dan kekuasaan dapat mendisiplinkan subjek atau objek tertentu. Politik etis yang berkuasa dan telah mendisiplinkan rakyat menganggap Sarekat Islam sebagai ancaman dan film ini menggambarkan bagaimana rezim episteme dalam suatu masa dapat dilihat melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan prosedur penciptaan wacana dan hubungan antara kekuasaan, pengetahuan dan subjek pada film ini.

METODE

Metode penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan objek material film yang didalamnya ada perkataan berbentuk teks. Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah analisis wacana kritis yang dipelopori oleh Foucault. Penelitian ini berfokus pada wacana dalam masa politik etis yang terjadi di Indonesia dalam film Guru Bangsa Tjokroaminoto.

Untuk menganalisis suatu zaman, metode yang digunakan oleh Foucault yaitu membedah sejarah (*counter-history*). Ia tidak menulis sejarah tetapi membedah sejarah yang sudah ada. Sejarah yang sudah ada tidak dilihat sebagai kebenaran mutlak atau kejadian beruntun yang dibenarkan. Namun dalam sejarah ada kemungkinan lain yang bisa merumuskan kejadian sejarah, artinya sejarah bukan hanya berupa kelanjutan (kontinuitas). Jika sejarah dilihat sebagai kelanjutan ada juga diskontinuitas yang dianggap materi mentah yang harus direduksi, ditata, dan mungkin ada bagian yang harus dibuang agar kelanjutan kejadian-kejadian sejarah dapat diketahui (Foucault, 2012:11).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awal film menceritakan Tjokroaminoto yang berada di penjara kalisosok Surabaya karena dituduh membuat keributan di Garut. Peristiwa ini membuat gempar masyarakat karena Tjokroaminoto bukan pelaku kerusakan. Penjara, rumah sakit, kegilaan yang digagas oleh Foucault ditunjukkan dengan keberadaan Belanda di Indonesia pada zaman politik etis. Pada zaman penjajahan, kolonial yang memiliki kekuasaan dan kekuasaan ada karena adanya relasi, relasi kekuasaan tak luput dari pengetahuan dan pengetahuan yang menentukan pendidiplinan (Martono, 2014: 88-91).

“aku Cecilius Vand Djik dari opsir Hindia Belanda menginkani mendapatkan kesaksian dari Tuan Tjokro yang terlihat dari terkumpulnya bukti-bukti atas peristiwa di Kota Garut Jawa Barat. kami mendapatkan bukti bahwa kau

pemimpin perkumpulan Bumi Putra Oemar Said Tjokroaminoto, kesaksian palsu lalu menjadi dalang dilakukan Sarekat Islam, silahkan tuan Tjokro, harap bersikap sopan! Mohon balik badan dan dekatkan pada meja” penjaga penjara mengambil pistol (Guru Bangsa Tjokroaminoto, 2015: 02.02) (Nugroho, 2015).

Dalam percakapan diatas Tjokroaminoto sebagai ketua organisasi Sarikat Islam menentang dengan tidak menghadap opsir Vand Djik yang mengintrogasinya lalu membuat opsir itu marah dan meminta opsir lain untuk menembak. Penangkapan yang dilakukan oleh Belanda karena adanya rezim pengetahuan bahwa Sarikat Islam adalah pembuat masalah dan dalangnya adalah ketuanya yaitu Tjokroaminoto. Penangkapan ini juga merupakan tanda pendisiplinan individu dari wacana politik etis yang digagas oleh Belanda. Bahwa organisasi yang tidak disetujui oleh Belanda akan menimbulkan kerusakan.

Percakapan antara opsir penjaga penjara, Vand Djik dan Tjokroaminoto memiliki kontrol yang berbeda. Tjokro yang ditangkap di penjara memiliki kontrol yang berbeda dengan opsir dan penjaga penjara, Tjokro yang diam dan penjaga penjara yang tidak dapat memukul Tjokro karena kontrol dari opsirnya. Dalam hal ini, Foucault yang memarginalkan fokus studi mengenai kontrol hingga berbeda jauh dari analisis yang dikenalkan oleh Marxisme yaitu kelas dan ekonomi (Beilharz, 2003):128) salah satunya objeknya yaitu penjara, rumah sakit, klinik asumsi tentang sakit, kegilaan dan penjara. Foucault yang tertarik pada asumsi yang mengatakan benar dan salah, pengetahuan yang dipraktikkan dalam kekuasaan dan bagaimana bentuk prakteknya dalam masyarakat. Salah satunya pengetahuan atas tuduhan yang dialami oleh Tjokro karena mendirikan organisasi yang merugikan kekuasaan Belanda pada masa tersebut.

Ruang individu yang bisa meposisi satu kedudukannya dan dapat mengatakan benar atau salah yang dipraktikkan dalam masyarakat atau wacana yaitu pengetahuan. Arena, koordinasi dan kedudukan tentang materi, konsep, dan bahan yang dapat diartikan, diganti, digunakan yaitu dengan pengetahuan. Menentukan Pengetahuan dapat menggunakan kesempatan penggunaan dan pembiasaan yang didukung oleh wacana (diskursus) (Bevir, 1999: 347).

Ruang individu yang dimiliki oleh opsir Vand Djik yang memiliki kontrol atas benar dan salah dipraktikkan dengan kekuasaannya, arenanya sebagai opsir memiliki pengetahuan bahwa Sarekat Islam tidak mematuhi aturan yang sudah dibuatnya dan koordinasinya dipraktikkan dalam

masyarakat untuk menembak ketua Sarekat Islam. Tjokroaminoto sebagai ketua **Sarekat Islam** juga memiliki kontrolnya sebagai pemimpin organisasi terkuat untuk melakukan resistensi terhadap penjajahan yang mencoba mendisiplinkan penduduk pribumi di buminya sendiri.

Pendisiplinan dilakukan oleh Belanda terhadap masyarakat pribumi, terjadi karena adanya wacana bahwa politik etis hadir untuk membantu Indonesia salah satunya dengan memberi pekerjaan seperti buruh. Prosedur-prosedur penciptaan wacana yaitu dengan adanya larangan objektif, larangan kontekstual seperti ritual, larangan subjektif atau hak bicara istimewa yang dimiliki subjek-subjek tertentu, pembagian dan penolakan seperti orang gila yang dianggap tidak bermakna, dan yang terakhir adalah oposisi salah dan benar (Faruk, 1999: 70). Wacana ini berperan untuk mendisiplinkan dan bentukannya melalui hal-hal yang dilarang seperti:

kalau kami sakit apa yang bisa kalian lakukan mengerti bodoh, karena itu aku disini, kalian semua dengar aku setiap aturan yang ada, hentikan kegiatanmu, berhenti mengetik, dasar tidak tahu malu. Seperti yang kukatakan yang melanggar aturan akan mendapatkan imbasnya?" (Guru Besar Tjokroaminoto, 2015: 14.07)

"tuan menikmati teh ini pagi dan sore yang ditanam dengan kesungguhan mereka di tanah mereka, untuk kesuburan negara tuan" memberikan teh hingga terjatuh-jatuh

"pecat Tjokroaminoto!!" setelah melawan (Guru Besar Tjokroaminoto, 2015: 15.00)

"mereka yang kabur dari perkebunan"

"penjara ini pasti kekurangan sipir dan penjaga serdadu" (Guru Besar Tjokroaminoto, 2015: 19.38)

Salah satu bentuk normalisasi adalah Belanda memiliki buruh yang dipekerjakan secara keras di bidang percetakan, perkebunan dan lain sebagainya. Jika tidak sesuai dengan aturan yang mereka bilang seperti percakapan pertama, peraturannya harus memakai sarung tangan jika ingin memberikan teh agar penyakit tidak menular. Namun karena itu adalah larangan dan tidak dipatuhi mereka dihukum. Aturan yang dibuat oleh para penjajah mendisiplinkan pekerja, bahwa dengan adanya kata-kata yang berbentuk aturan memiliki kontrol atas normalisasi hukuman dan larangan terhadap subjek yang berada dibawah kuasanya. Begitupula Tjokroaminoto yang tidak kuasa melihat itu semua hingga membela temannya dia juga dipecat karena tidak sesuai dengan peraturan yang mereka miliki. Contoh lainnya orang yang kabur dari perkebunan mereka juga dihukum jika pekerjaannya tidak sesuai target yang mereka buat.

Dalam hal ini keinginan Foucault untuk memaparkan bahwa bentuk dari kekuasaan adalah rezim wacana. Kekuasaan yang ada pada masa sistem Tanam Paksa dimiliki oleh Belanda dengan wacana sistemnya yang dipraktekkan di masyarakat. Praktek-praktek yang seperti aturan-aturan dalam bekerja, perkebunan, percetakan, terposisikan dan memposisikan sebagai wacana yang mengklaim kejujuran dan konteksualisasi sebagai suatu pengetahuan. Tuntutan kebenaran merupakan sistem beropreasinya suatu wacana sebagai kekuasaan yang juga melegitimasi tempat lain atau institusi-institusi dan kegiatan sosial (Agustin, 2009: 201).

Kekeuasaan itu bukan terletak pada objek atau sesuatu yang dimiliki tetapi letaknya pada relasi yaitu produktifitas yang menciptakan konserversi. Relasi itu adalah sistem yang tersebar dimana-mana, jadi bagaimana kita mengasosiasikan kekuasaan yang ada dengan wacana yaitu wacana yang diproduksi dengan pengetahuan (Foucault, 1978: 92-93).

Wacana-wacana lain yaitu dengan adanya normalisasi bagi tubuh masyarakat Indonesia yang menjadi buruh. Bentuk normalisasinya adalah larangan-larangan dan penentuan salah dan benar yang ada dalam kutipan diatas, dilarang berbicara atau membantah sekalipun ditunjukkan dalam kutipan diatas. Kehendak kebenaran ini juga disokong oleh institusi salah satunya sekolah dan diperkuat dengan praktik-praktik subjek di dalamnya.

"disini Netherland, disini Australia, disini Hindia Belanda, terbukanya terusan Suez dan jika ada terusan pelabuhan di dekat sini apa akibatnya? Siapa yang tau akibatnya?" guru menjelaskan peta dan bertanya

"saya mengetahui alasan kedatangan orang-orang Eropa untuk mendapatkan apa yang mereka tidak dimilikinya yaitu teh, kopi, karet, pala, tembaku dan cengkeh, untuk kesejahteraan mereka.." Tjokro menjawab dari luar kelas

"tutup mulutmu!" menambah hukuman dan menyuruhnya pergi

Mereka juga menginginkan pelabuha-pelabuhan agar mendapatkan hasil yang kita miliki setiap tahun, orang orang Eropa disini hanya menjadi raja sehari

"bicara banyak kau" guru menggertaknya

"Tian Jansen yang tinggal dibelakang sekolah itu enak sekali menyuruh orang, dia memiliki pembantu 320 orang" (Guru Besar Tjokroaminoto, 2015: 08.48)

Tjokroaminoto merupakan seorang bangsaawan yang mendapatkan pendidikan yang tergolong baik. Kejadian saat guru kelas belum datang, anak-anak pribumi menghina anak-anak Belanda, lalu guru datang dan menghukum Tjokro saja, pada saat guru

menjelaskan tentang peta-peta Tjokro menjawab dari luar kelas yang membuat gurunya kesal karena jawaban Tjokro benar, namun kontrol guru lebih kuat karena guru yang lebih mengetahui hingga Tjokro mendapatkan hukuman yang lebih berat dan diapun diusir. Mendapat hukuman karena ketidaksiplinanannya merupakan hasil dari sebuah episteme era politik etis dimana Tjokro yang benar dianggap salah karena guru yang mendisiplinkan murid dan memberikan pendidikan, pengetahuan dan membentuk murid. Pengetahuan yang ada juga masuk dalam ranah institusi seperti sekolah. Sekolah memiliki aturan yang menormalisasikan muridnya untuk mematuhi aturan instansi dan guru.

Adanya relasi kekuasaan yang didapat dari pengetahuan yang ada pada era politik etis, sistem politik balas budi dengan adanya wacana kesejahteraan didukung juga oleh institusi dan relasi masyarakat seperti bupati dan lainnya salah satunya saat Tjokro membantu temannya dan dia dipecah, bapak mertuanya yang merupakan seorang bupati tidak terima karena Tjokro tidak mematuhi sistem yang sudah ada.

“Tjokro, benarkah kamu akan berhenti dari penggaweanmu?, jika benar kamu minggat dari tempat ini. This is about honour; kerajaan Jawa sudah tidak memiliki kekuasaan, tidak ada kekuasaan yang tetap, kekuasaan tetap ada pada pemerintahan Belanda. Keluarga kita sudah dapat posisi yang tepat, palungguhan, aku sudah katakan kepadamu tempat ini bukan hanya kediaman. Bukan hanya rumah tapi juga tempat tinggal, tempat dimana kita menjaga martabat yang sudah kau musnahkan, kau mengerti? Bodoh! ” (Guru Besar Tjokroaminoto, 2015: 15.58)

Rezim pengetahuan pada film dilatar belakangi dengan sistem tanam paksa yaitu pada masa penjajahan Belanda. Film ini mengungkapkan adanya kekuasaan tidak dapat dipisahkan dengan pengetahuan karena keduanya saling mempengaruhi. Pengetahuan atau episteme mengendalikan cara kita untuk memahami realitas suatu zaman yaitu episteme tertentu yang tidak disadari dan berlangsung begitu lama.

“ayah dahulu ayah sama ibu menikahkan aku dengan orang yang aku kenal dengan mas Tjokro, aku patuh, sekarang ayah sama ibu akan menceraikanku dengan mas Tjokro aku hanya bisa diam dalam hati, untuk selanjutnya seumur hidup Soeharsikin tidak akan menikah lagi karena suamiku hanya Tjokroaminoto semata dunia dan akhirat” (Guru Besar Tjokroaminoto, 2015: 21.30)

Anak yang harus mematuhi kedua orangtuanya dengan dalih atau berharap dengan kepatuhannya akan mengantarkan ke surga itu juga merupakan proses

normalisasi yaitu anak harus menuruti perkataan orangtuanya. Dalam hal ini istri pak Tjokroaminoto yaitu Soeharsikin, ketika Tjokro tidak mematuhi ayah mertuanya, Soeharsikin diminta untuk bercerai dengan alasan Tjokro pergi karena untuk keluyuran. Sebuah pengetahuan dan episteme pada zaman itu anak perempuan harus mematuhi ayahnya bahkan dalam hal memilih pasangan yang tergambar dari sosok Soeharsikin yang harus menikah dengan keturunan bangsawan juga. Perbedaan episteme juga terlihat pada setiap eranya yang dibongkar melalui sejarahnya.

Kuasa yang digagas oleh Foucault juga terdapat pada tatanan mikro seperti keluarga, hubungan suami dan istri hingga yang tidak memiliki hubungan apa pun.

“kamu sudah mendapat kabar tentang kemampuan tuan untuk memberantai perkelahian yang ada di Surabaya, dan mendengar kemampuan tuan sebagai advokat yang membantu warga, apa tuan juga sudah mendapat kabar apa yang terjadi di Surakarta maupun Batavia, dan perkelahiannya ini menuduh kami yang di Surakarta menyebabkan kerusuhan ini, Belanda memdiamkan pekumpulan kami para pedagang yang tidak bisa berdagang lagi” H. Samanhudi (Guru Besar Tjokroaminoto, 2015: 51.54)

Relasi kekuasaan yaitu Tjokro dan para cendekiawan yang tergabung dalam organisasi yaitu Sarikat Dagang Islam. Sarikat dagang islam yang memiliki para cendekiawan yang pintar dan memiliki haknya sebagai pedagang, dan organisasinya tidak bisa beropersi lagi karena tidak disetujui oleh Belanda. Adu domba yang terjadi antara orang Tionghoa dan Jawa karena sistem pengetahuan berkata bahwa Jawa dan Islamlah yang berhak untuk membuat perkumpulan.

Kepiawaian Tjokroaminoto bersama teman-temannya yang lain membentuk Sarikat Dagang Islam menjadi Sarikat Islam untuk memerdekakan manusia yang dinilai seperempat manusia. Wacana memerdekakan manusia menilai manusia semua sama, baik yang besar, kecil, kaya miskin semua sama. Wacana yang dibangun oleh sistem pengetahuan tertentu pada suatu zaman ini menentang penjajahan yang ingin mendidik atau mensejahterakan Bumiputera. Pemikiran-pemikiran seperti membentuk organisasi, revolusi, dan merdeka atau membentuk pemerintahan sendiri tidak diperbolehkan. Salah satunya adalah pembagian dan penolakan seperti kalimat dibawah ini:

“aku ingin membicarakan Tjokroaminoto, tuan kenal?” Handelfit

*“ya” Ringkes yang membantu Tjokroaminoto
“sudah kuduga, dia berbahaya, kumohon berhati-hatilah, semua buruhku mogok kerja karena dia”*

“di dunia baru ini kita memerlukan Tjokroaminoto untuk menjadi jembatan antara mereka dan kita”
“apa yang kau katakan? Biar ku peringatkan Tjokro berbahaya, dia memanfaatkan islam demi cita-cita politiknya” (Guru Besar Tjokroaminoto, 2015: 01.06.39)

Pembicaraan diatas adalah Handelfit dan Ringkes dua orang bangsawan belanda yang memperkerjakan orang Indoensia. Tjokro membantu orang indonesia yang bekerja di tempat Handelfit dan melawannya. Tjokro yang menolak dan tidak taat peraturan dianggap gila dan salah, dan sehingga konteks kegilaan yang dimaksud adalah pelawanan Tjokroaminoto yang tidak mematuhi peraturan hingga dianggap berbahaya menurut orang Belanda. Anggapan gila dan lain karena melawan ini beriringan dengan konteks sejarah yang pada masa itu sistem tanam paksa berlaku di Indonesia.

Peraturan, pendisiplinan, yang ada melarang konsep atau pandangan baru, Tjokro dan semua orang bumiputera dibatasi untuk mengeluarkan sesuatu yang berbeda dalam batas yang telah ditentukan. Pernyataan yang diterima dan pandangan yang tidak diterima tentang objek yang ditinggalkan. Contoh lainnya pandangan yang tidak diterima atau akan ditinggalkan:

“katanya pidatonya mas Tjokro membuat orang kecil tak tau diri, teman-teman priyaiiku banyak yang menyindir mas Tjokro mengatakan bahwa pidato mas Tjokro membuat kerusuhan dimanamanya” Soeharsikin (Guru Besar Tjokroaminoto, 2015: 01.13.20)

Pernyataan ini diajukan oleh istri Tjokro yaitu Soeharsikin yang mendengar suaminya dipandang tidak baik oleh teman-teman priyainya karena pidatonya dianggap merendahkan kaum bangsawan yang setuju dengan Belanda. Wacana pandangan Tjokro yang dinilai salah juga terlihat dalam pidatonya yang membuat organisasi untuk membantu perekebunan dan masyarakat dapat bekerja dengan nyaman. Sistem dan pengetahuan apa yang menentukan Tjokro sebagai orang yang berbahaya yaitu adanya penjajahan Belanda dan sistem penjajahan yang dibungkus menjadi politik etis yang membuat peraturan. Salah satunya juga ajakan untuk tidak bekerja:

“aku mendapat kabar pemuda bernama semaun dia mengajak buruh parbik untuk mogok bekerja dan hal aneh lainnya seorang pemberontak yang aktif mengajak orang melakukan kekerasan orang itu berbahaya cari dia dan tangkap” (Guru Besar Tjokroaminoto, 2015: 02.04.49)

Pada masa ini **Sarikat Islam**, Tjokro, dan pandangan membentuk Negara sendiri dinilai

berbahaya. Salah satunya yang dilakukan Semaun yang membuat buruh-buruh di desa tidak bekerja, dengan pengetahuan yang di dapat oleh buruh bahwa Semaun adalah orang yang berpendidikan. Dan kekerasan kelompok tani kecil di Garut yang dianggap tidak sesuai moral yang diajarkan politis terpaksa dibunuh oleh sistem pengetahuan moral belanda.

“Tuan Tjokro kmai baru saja mendapat lampiran resmi, bahwa beras yang kita impor membawa tikus dan penyakit, banyak warga yang kena tifus, kemungkinan istri tuan terkena tifus, kami akan memeriksanya kembali” (Guru Besar Tjokroaminoto, 2015: 01.47.33)

Pada scene diatas menunjukkan bahwa rumah sakit, klinik, psikologi dan lain sebagainya adapat menentukan subjek yang sakit. Istri Tjokroaminoto Soeharsikin terpaksa didiagnosa penyakit tifus yang berasal dari beras yang mereka gunakan, namun hanya istrinya yang terkena penyakit dan lainnya tidak. Foucault yang juga meneliti tentang rumah sakit beranggapan bahwa rumah sakit memiliki pengetahuan untuk menentukan kegilaan dan sakit. Salah satunya juga terlihat dengan ibu Soeharsikin yang didiagnosa penyakit.

“hei hei hei mau kemanna kamu?”

“ini jam malam” “aku ngerti tapi anaku sakit”
“tapi kamu orang harus tertib, balik, balik!”
 (Guru Besar Tjokroaminoto, 2015: 02.16.10)

Pada akhir film Tjokro yang dipanggil oleh pengadilan karena menentang sistem politik balas budi, membuat semua orang yang berada di sekitarnya juga ditangkap dan diadili. Rumah Tjokro juga dijaga ketat oleh tentara yang bertugas agar keluarganya juga tidak menyebarkan pengetahuan yang aneh dan tidak masuk akal. Pada scene ini Mbok yang bekerja disamping ibu Soeharsikin ingin keluar untuk membeli obat namun tidak diperbolehkan karena adanya pemberlakuan jam malam. Pemberlakuan jam malam juga terjadi pada masa covid-19, pengetahuan yang tersebar akan penyakit membuat semua orang berada di rumah.

SIMPULAN

Film ini mengisahkan tentang perlawanan Oemar Said Tjokroaminoto dan para cendekiwan melawan wacana-wacana politik etis tentang pendidikan, berbahaya, penangkapan bagi perusak norma zaman politik etis. Penelitian ini menggunakan analisis wacana atau diskursus untuk melihat relasi kekuasaan yang terbentuk dari episteme atau pengetahuan di zaman politik etis. Peneliti menemukan bahwa pada zaman politik etis episteme atau pengetahuan yang

terjadi era itu dibentuk karena penjajahan Belanda dengan memberikan pendidikan, imigrasi, serta kesejahteraan. Dari pengetahuan itu muncul kekuasaan yang mendisiplinkan, menormalisasikan terbentuk dari pengetahuan dan relasi kekuasaan Penelitian ini juga untuk memahami dan menemukan suatu kebenaran pada zamannya. Penelitian ini menemukan normalisasi subjek-subjek atau masyarakat dengan pengetahuan bahwa mereka dibentuk dan didik oleh penjajah dan pelarangan, penolakan, dan oposisi benar dan salah juga terlihat dalam film dengan sosok Tjokroaminoto di sekolah, buruh, pekerja, sipir penjara. Penolakan organisasi seperti sarakat dagang islam, yang tidak sesuai dengan politik etis, pandangan tentang kemajuan, pembatasan kekuasaan. Kedisiplinan dan hukuman yang didapat yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Hukuman yang juga mendisiplinkan institusi yaitu sekolah hingga mikro kecil seperti organisasi, hukuman diberikan oleh guru kepada murid dalam pelarangan berkomentar atau menjawab soal, hingga pendisiplinan tubuh yang dinormalisasikan oleh perempuan sebagai dalih untuk patuh kepada orangtua.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, S. M. (2009). Foucault Dan Komunikasi (Telaah Konstruksi Wacana Dan Kuasa Foucault Dalam Lingkup Ilmu Komunikasi). *Jurnal Ilmu Komunikasi UPNYK*, 7(3).
- Beilharz, P. (2003). *Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis terhadap para Filosof Terkemuka*. Pustaka Pelajar.
- Bevir, M. (1999). Foucault, Power, and Institutions. *Political Studies*, 47(2), 345–359. <https://doi.org/10.1111/1467-9248.00204>
- Faruk. (1999). *Pengantar sosiologi sastra: dari strukturalisme genetik sampai post-modernisme*. Pustaka Pelajar.
- Foucault, M. (1978). *The History of Sexuality: An introduction*. Pantheon Books. <https://books.google.co.id/books?id=h8knAAAAYAAJ>
- Foucault, M. (2002). *Arkeologi Pengetahuan* (M. Zoerni (ed.)). Qalam.
- Foucault, M. (2012). *Arkeologi Pengetahuan, Menggugat Sejarah Ide*. IRCiSoD.
- Foucault, M. (2017). *Power or Knowledge*. Narasi: Pustaka Prometheus.
- Halwati, U. (2013). Analisis Foucault Dalam Membedah Wacana Teks Dakwah Di Media Massa. *AT-TABSIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 1(1).
- Makmur, D. (Departemen P. dan K. (1993). *Sejarah Pendidikan Indonesia di Zaman Penjajahan*. CV. Manggala Bhakti.
- Martono, N. (2014). *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas (sampel halaman gratis)*. Raja Grafindo Persada.
- Meriel & Thomas, B. (2007). *The Practice of Critical Discourse Analysis. An Introduction*. Holder Education.
- Nugroho, G. (2015, April 9). *Tjokroaminoto: Guru Bangsa*. Yayasan Keluarga Besar HOS Tjokroaminoto Picklok Production.
- Susilo, A., & Isbandiyah, I. (2018). Politik Etis Dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia. *Historia. Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(2), 403. <https://doi.org/10.24127/hj.v6i2.1531>
- Toni, A. (2018). Konstruksi Keindonesiaan Dalam Film Tjokroaminoto. *Communication*, 9(1), 19. <https://doi.org/10.36080/comm.v9i1.613>
- van Niel, R. (2009). *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Dunia Pustaka Jaya. <https://books.google.co.id/books?id=XiWmDwAAQBAJ>
- Wiradnyana, K. (2018). *Michel Foucault: Arkeologi Pengetahuan dan Pengetahuan Arkeologi*. YayasanPustakaOborIndonesia. <https://books.google.co.id/books?id=NPlIDwAAQBAJ>